

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pihak yang berwenang dalam menentukan aspek legalitas di dalam perhitungan penyesuaian harga/eskalasi harga yaitu pihak owner yang diwakili oleh konsultan dan Tenaga Ahli dalam bidang *contract specialist* dan pihak kontraktor.
2. Nilai penyesuaian harga/eskalasi tahun 2010 dengan analisis menggunakan Keppres No. 80 Tahun 2003 untuk item pekerjaan yang dikerjakan oleh CIC (Consortium of Indonesian Contractors) yaitu sebesar Rp 7,687,572,822.55 dan untuk item pekerjaan yang dikerjakan oleh Sinohydro yaitu sebesar \$2,616,899.13.
3. Nilai penyesuaian harga/eskalasi tahun 2010 dengan analisis menggunakan Perpres No. 4 Tahun 2015 untuk item pekerjaan yang dikerjakan oleh CIC (Consortium of Indonesian Contractors) yaitu sebesar Rp 3,747,300,750.68 dan untuk item pekerjaan yang dikerjakan oleh Sinohydro yaitu sebesar \$1,231,039.51.
4. Nilai penyesuaian harga/eskalasi untuk item pekerjaan yang dikerjakan pada tahun 2010 baik oleh CIC (Consortium of Indonesian Contractors) maupun Sinohydro dengan menggunakan Perpres No.4 Tahun 2015 bagi pemilik proyek/*owner* memberikan hasil, yaitu nilai eskalasi yang harus dibayarkan lebih kecil dibandingkan bila menggunakan Keppres No. 80 Tahun 2003. Dengan kata lain bahwa analisis penyesuaian harga dengan menggunakan Perpres No. 4 Tahun 2015 lebih menguntungkan bagi pemilik proyek/*owner* dibandingkan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.
5. Nilai yang akan datang (*future value*) dari hasil perhitungan penyesuaian harga/eskalasi pada tahun 2010 dengan menggunakan Keppres No.80 Tahun 2003 lebih besar dari pada nilai yang akan datang (*future value*) dari hasil

perhitungan penyesuaian harga/eskalasi pada tahun 2010 dengan menggunakan Perpres No. 4 Tahun 2015.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Sehubungan dengan adanya perubahan peraturan mengenai penyesuaian harga/ eskalasi harga khususnya untuk proyek-proyek tahun jamak (*multi years*), sebaiknya peraturan yang diadopsi yaitu menggunakan peraturan perundangan terbaru yang berlaku.